

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan gambaran dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang sudah ada lalu tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia. Dan kini, pemerintah Indonesia terus berusaha dalam meningkatkan pelaksanaan Pembangunan Nasional dengan harapan agar laju pembangunan di kota dan desa semakin seimbang dan serasi. Sebagai wujud pengakuan negara terhadap desa, khususnya dalam upaya memperjelas fungsi dan kewenangan desa, memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan, maka suatu kesempatan besar diberikan kepada desa. Desa diberi kesempatan untuk dapat mengurus tata pemerintahannya sendiri, mengelola keuangannya, dan melaksanakan pembangunan demi meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakatnya. Pada akhirnya Pemerintahan Presiden Jokowi pun menetapkan suatu kebijakan penataan dan pengaturan mengenai desa yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Berdasarkan undang-undang khusus tentang desa tersebut pemerintah pun melahirkan suatu program baru yang disebut Dana Desa, dengan alokasi dana yang begitu besar. Dana Desa ini sendiri sesungguhnya menggantikan program pemerintah sebelumnya yang dulu disebut Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Program Dana Desa ini bukan hanya yang pertama di Indonesia, namun juga merupakan jenis program yang pertama dan terbesar di seluruh dunia. Pemerintah berkomitmen tinggi dan konsisten dalam peningkatan pembangunan nasional, hal ini terbukti dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang terus meningkat di setiap tahunnya. Pada tahun 2015, Dana Desa dianggarkan sebesar Rp 20,7 triliun, dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp 280 juta. Pada tahun 2016, Dana Desa meningkat menjadi Rp 46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp 628 juta dan di tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp 60 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp 800 juta, dan Dana

Desa tahun anggaran 2018 telah dialokasikan sebesar Rp 60 triliun (Kementrian Keuangan, 2018).

Jumlah dana yang diterima oleh setiap desa yang begitu besar, tentunya harus disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu, prinsip transparansi dan akuntabilitas harus mampu diterapkan oleh pemerintah desa mengingat dalam pengelolaan keuangan desa tersebut, pemerintah desa dituntut membuat sejumlah laporan diantaranya: Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa (Semesteran), Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), Realisasi Pelaksanaan APB Desa (Tahunan), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan (LPP) Desa Tahunan dan LPP Desa akhir Masa Jabatan, Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa (APBN) per Semester untuk dikompilasi dan dilaporkan ke Menteri Keuangan, serta Laporan Kekayaan Milik Desa (Tahunan) (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2018). Laporan-laporan tersebut hendaknya memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yakni harus relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (Hasanah dan Fauzi, 2017:37). Dengan demikian maka segala informasi yang termuat di dalam laporan keuangan desa harus berkualitas. Pembuatan laporan keuangan desa yang berkualitas akan menjadi salah satu bentuk transparansi oleh pemerintah desa atas pengelolaan keuangan Dana Desa untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Sehingga laporan keuangan yang dihasilkan memiliki manfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai yakni pemerintah desa sendiri, masyarakat desa, pemerintah daerah kabupaten atau provinsi hingga pemerintah pusat.

Laporan keuangan desa yang dihasilkan oleh pemerintah desa diharapkan berkualitas, oleh karena itu dikeluarkannya suatu kebijakan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang mewajibkan seluruh desa yang ada di Indonesia untuk menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) untuk pelaporan keuangan desa di tahun 2018 ini. Pengembangan SISKEUDES ini memang telah dipersiapkan sejak awal dalam rangka mengantisipasi penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Persiapan ini disertai dengan adanya perhatian lebih dari Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan

juga Komisi Pemberantasan Korupsi (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2018). Aplikasi SISKEUDES merupakan jenis aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa yang dirancang secara sederhana dan *user friendly* sehingga tidak menyulitkan pemerintah desa ketika mengoperasikannya.

Data yang diperoleh dari sosialisasi pengelolaan Dana Desa bagi pembina dan pengawas desa Tahun Anggaran 2017 diketahui bahwa hingga saat ini upaya penerapan aplikasi SISKEUDES di Nusa Tenggara Timur masih terbatas untuk 2.996 desa. Jumlah desa yang telah memperoleh sosialisasi dan bimbingan teknis 1.907 desa sedangkan untuk implementasinya hanya kepada 11 kabupaten/kota dengan jumlah desa 1.389 atau sebesar 46,36% (Kementrian Keuangan, 2018). Sehingga terlihat bahwa, penerapan aplikasi SISKEUDES di NTT termasuk dalam kategori terlambat dan belum merata dibandingkan dengan provinsi lain yang sudah menggunakan aplikasi ini sejak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) meluncurkannya di pertengahan 2015 lalu.

Penelitian ini mengambil obyek pemerintah desa di Kecamatan Koting. Kecamatan Koting merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jumlah desa yang ada di Kecamatan Koting yakni sebanyak 6 desa dan baru menggunakan aplikasi SISKEUDES di tahun 2018 ini, dengan sebelumnya sudah 3 kali mengikuti pelatihan aparatur pemerintah desa untuk penggunaan aplikasi SISKEUDES. Aplikasi SISKEUDES ini baru dan wajib diterapkan, hal ini tentunya menyebabkan pemerintah desa Kecamatan Koting dalam membuat laporan keuangan desa yang selama ini dilakukan secara manual berganti menjadi terkomputerisasi. Namun kenyataannya masih ada pemerintah desa di Kecamatan Koting yang belum sepenuhnya paham dalam mengoperasikan komputer dan internet. Oleh karena itu, penggunaan aplikasi SISKEUDES dijalankan oleh pihak yang tidak seharusnya. Apabila pemanfaatan teknologi berupa Aplikasi SISKEUDES ini dilakukan dengan tepat tentu dapat meminimalisir kesalahan dalam setiap proses pengolahan data, sehingga laporan keuangan yang dihasilkanpun berkualitas.

Laporan yang berkualitas tersebut bertujuan agar dalam pemeriksaan atas pengelolaan dana desa dapat dinilai pula apakah sistem pengendalian internal dalam pelaksanaan belanja dana desa telah dirancang dan dilaksanakan secara maksimal sehingga tujuan dari pengendalian tercapai, serta pengelolaan dan pertanggungjawaban dana desa telah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemeriksaan tersebut meliputi pengelolaan dana desa serta kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintah desa atas pengelolaan dana desa. Pada semester II tahun 2017, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memeriksa pengelolaan dana desa Tahun Anggaran 2016 dan semester I 2017. Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pemerintah desa belum sepenuhnya menerapkan sistem pengendalian internal yang memadai. Permasalahan utama pengendalian internal dalam pengelolaan dana desa adalah Prosedur Standar Operasional (POS) belum disusun atau tidak lengkap, perencanaan kegiatan tidak memadai, penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja, dan lain-lain kelemahan sistem pengendalian internal (BPK, IHPS, Semester II 2017:199). Beberapa lembaga pemantau (*watch*), juga mengkritisi lemahnya sistem pengendalian internal yang diterapkan di pemerintahan, sehingga membuka peluang yang sangat besar bagi terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran (APBN/APBD). Pemerintah sendiri kemudian menerbitkan PP No. 60 Tahun 2008 tentang standar pengendalian internal pemerintahan (Syukri dan Fanar, 2009; dalam Komarudin, 2014).

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah seperti dalam penelitian yang dilakukan oleh Mutiana, Diantimala, dan Zuraida (2017) mengenai pengaruh sistem pengendalian internal, teknologi informasi, kualitas sumber daya manusia dan komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal, teknologi informasi, kualitas sumber daya manusia dan komitmen organisasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hasil penelitian terkait 2 variabel independen/bebas yakni sistem pengendalian internal dan pemanfaatan teknologi tersebut juga sesuai dengan penelitian Nurillah dan Muid (2014). Kedua variabel tersebut berpengaruh positif secara

signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini berarti semakin baiknya suatu sistem pengendalian internal maka kualitas laporan keuangan daerah akan semakin meningkat, sedangkan pemanfaatan teknologi informasi yang meliputi teknologi komputer, internet dan teknologi komunikasi akan sangat membantu mempercepat proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah sehingga kualitas laporan keuangan daerah akan meningkat.

Penelitian lain yang dilakukan dengan variabel independen serupa ketika diuji pengaruhnya terhadap keandalan laporan keuangan daerah memperoleh hasil yang berbeda. Keandalan merupakan salah satu dari karakteristik kualitas laporan keuangan. Hasil yang berbeda tersebut dilihat dari penelitian Wardani dan Adriyani (2017) dimana sistem pengendalian internal berpengaruh positif secara signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah desa sedangkan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan desa. Hal ini berarti sistem pengendalian internal pemerintah yang dilaksanakan oleh perangkat desa secara optimal dan terus-menerus akan mampu memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya laporan keuangan yang andal. Sedangkan pemanfaatan teknologi informasi yang tidak atau belum optimal serta pengimplementasiannya yang ternyata membutuhkan biaya cukup banyak menjadikan implementasi dari teknologi informasi ini sia-sia sehingga tidak dapat mendukung keandalan penyajian laporan keuangan desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Karmila, Tanjung, dan Darlis (2013) menemukan bukti empiris yang sebaliknya yaitu bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah sedangkan untuk pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini berarti sistem pengendalian internal yang lemah akan memberikan keyakinan yang tidak memadai mengenai pencapaian tujuan pelaporan keuangan pemerintah yang dapat tercermin dari keandalan nilai informasi laporan keuangan. Sedangkan pemanfaatan teknologi informasi pada pemerintah daerah bila digunakan secara

optimal untuk pemrosesan, penyimpanan, dan penyebaran informasi dapat memberikan peningkatan keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diketahui bahwa adanya inkonsistensi hasil penelitian, maka peneliti ingin melakukan penelitian serupa terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Penelitian ini akan meneliti pengaruh dari sistem pengendalian internal dan pemanfaatan teknologi terhadap kualitas laporan keuangan desa. Dalam penelitian ini, sistem pengendalian internal akan fokus ke lingkup yang lebih kecil berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lingkungannya di tingkat kabupaten ataupun provinsi, untuk meneliti dan menganalisa lebih dalam sistem pengendalian internal yang ada di tingkat desa. Karena pada saat ini pemerintahan desa sendirilah yang mengurus tata pemerintahan, pengelolaan keuangan, dan pelaksanaan pembangunannya. Sehingga dapat diketahui apakah sistem pengendalian internal pemerintah desa mampu berjalan dengan baik, dan dapat mendukung terciptanya pelaporan keuangan desa yang berkualitas. Selain itu, perbedaan penelitian ini dengan dengan penelitian sebelumnya juga terletak pada variabel independen yang diteliti berupa pemanfaatan teknologi akan diteliti lebih spesifik mengarah kepada pemanfaatan aplikasi SISKEUDES oleh pemerintah desa. Variabel ini diteliti karena melihat pesatnya kemajuan teknologi informasi saat ini, maka sudah seharusnya pelaporan keuangan desa memanfaatkan teknologi informasi yang lebih modern. Namun pemanfaatan teknologi informasi yang tersedia seringkali belum dapat dilakukan secara maksimal sehingga perlu diteliti apakah desa sudah mengimplementasikan aplikasi SISKEUDES dengan baik. Pengelolaan laporan keuangan dengan aplikasi SISKEUDES ini tentu diharapkan memberi dampak positif sehingga dapat mendukung terciptanya pelaporan keuangan desa yang berkualitas.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Pemanfaatan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa Di Kecamatan Koting, Kabupaten Sikka”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan desa di Kecamatan Koting?
2. Apakah pemanfaatan teknologi berupa aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan desa di Kecamatan Koting?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan desa di Kecamatan Koting.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi berupa aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) terhadap kualitas laporan keuangan desa di Kecamatan Koting.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademik

Diharapkan hasil penelitian dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori yang sudah ada dan memperluas wawasan dan pengetahuan bagi peneliti dalam bidang penyajian laporan keuangan di sektor publik, khususnya mengenai pengaruh sistem pengendalian internal dan pemanfaatan teknologi informasi berupa aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) terhadap kualitas laporan keuangan desa.

1.4.2 Manfaat Praktik

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan bukti empiris mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan desa di Kecamatan Koting kepada pemerintah desa dan kabupaten. Sehingga pemerintah mendapat informasi untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan desa setiap tahunnya.

- b. Sebagai masukan bagi pengendalian internal dan pemanfaatan aplikasi SISKEUDES guna dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan desa di Kecamatan Koting sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.5 Sistematika Penulisan

Gambaran mengenai sistematika penulisan dalam penulisan skripsi ini yang secara keseluruhan terdiri dari 5 bab yang saling terhubung adalah sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah yang memuat alasan mendasar dilakukannya penelitian ini, rumusan masalah berupa pertanyaan yang merumuskan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, menjabarkan tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan secara keseluruhan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan mengenai landasan teori yang mendasari permasalahan yaitu dengan mereview sejumlah laporan penelitian terdahulu yang sejenis, lalu diperkuat dengan teori mengenai karakteristik kualitas laporan keuangan, sistem pengendalian internal, dan aplikasi SISKEUDES. Tahap selanjutnya dikembangkan menjadi sebuah hipotesis dan menyusun kerangka penelitian yang menggambarkan relasional antar variabel untuk dapat menjawab rumusan masalah.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai desain penelitian, identifikasi variabel beserta pengukurannya, jenis dan sumber data penelitian, alat dan metode pengumpulan data, populasi, sampel, teknik pengambilan sampel dan teknik analisis data yang digunakan.

BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai penjelasan hasil pengolahan data dan uraian mengenai hasil tersebut yang meliputi gambaran umum objek penelitian, deskripsi data, hasil analisis data, serta pembahasan terkait hasil penelitian.

BAB 5 SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Bab ini membahas tentang kesimpulan dari pengajuan hipotesis dan pembahasan hasil penelitian, keterbatasan penelitian, serta saran yang diberikan oleh peneliti bagi penelitian selanjutnya.